Al Iidara Balad
Jurnal Administrasi Negara
ISSN : 2685-8541
Vol. 8, No. 1, 2026
DOI :10.36658/aliidarabalad

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA (MUSRENBANGDES) DI DESA TELAGA ITAR KECAMATAN KELUA KABUPATEN TABALONG

Muhammad Akhyar Ilmi[1], Arif Budiman[2], Jumadi[3]
Program Studi Administrasi Publik
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai
e-mail: mhmmdakhyar12@gmail.com

ABSTRAK

Pelaksanaan Musrenbangdes di Desa Telaga Itar, Kecamatan Kelua, Kabupaten Tabalong, kerap menghadapi kendala klasik: anggaran yang terbatas membuat banyak aspirasi warga belum terakomodasi dalam RKPDes. Akibatnya, kepuasan masyarakat belum maksimal dan penentuan skala prioritas belum sepenuhnya menyentuh kebutuhan mendesak. Penelitian deskriptif-kualitatif ini bertujuan untuk memotret efektivitas agenda tersebut beserta faktor penentunya. Data dihimpun melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara dengan 12 informan yang dipilih secara purposive sampling. Secara umum, hasil studi menunjukkan proses Musrenbangdes berjalan cukup efektif. Dari sisi positif, keterbukaan komunikasi dan partisipasi aktif warga dalam mengusulkan ide sudah berjalan dengan baik. Namun, masih ada rapor merah pada aspek keterlibatan pemuda yang minim, dominasi pembangunan fisik, pemerataan wilayah yang belum seimbang, serta adanya intervensi pihak tertentu dalam penentuan program. Selain itu, kompetensi perangkat desa juga belum merata. Faktor pendukung utama gerakan ini adalah tingginya antusiasme warga dan komunikasi yang transparan. Sebaliknya, keterbatasan dana serta rendahnya pemahaman masyarakat mengenai skala prioritas menjadi batu sandungan terbesar. Guna membenahi sistem, pemerintah desa disarankan untuk meningkatkan pemerataan pembangunan, menjaga transparansi, serta lebih optimal dalam mengawal aspirasi warga.

Kata Kunci: Musrenbangdes, Aspirasi Masyarakat, Skala Prioritas

ABSTRACT

The implementation of the Village Development Planning Meeting (Musrenbangdes) in Telaga Itar Village, Kelua District, Tabalong Regency, often faces a classic obstacle: limited budgets mean that many residents' aspirations are not accommodated in the Village Development Work Plan (RKPDes). As a result, community satisfaction is not optimal, and priority setting does not fully address pressing needs. This descriptive-qualitative study aims to capture the effectiveness of this agenda and its determining factors. Data were collected through observation, documentation, and interviews with 12 informants selected using purposive sampling. Overall, the study results indicate that the Village Development Planning Meeting (Musrenbangdes) process has been quite effective. On the positive side, open communication and active participation of residents in proposing ideas have been well-established. However, there are still negative reports regarding minimal youth involvement, the dominance of physical development, unequal distribution of areas, and intervention by certain parties in program determination. Furthermore, the competence of village officials is also uneven. The main supporting factors for this movement are high community enthusiasm and transparent communication. Conversely, limited funds and poor public understanding of priority scales are the biggest stumbling blocks. To improve the system, village governments are advised to improve equitable development, maintain transparency, and better monitor community aspirations.

***Keywords**: Musrenbangdes, Community Aspirations, Priority Scale*

ISSN : 2685-8541
Vol. 8, No. 1, 2026
DOI :10.36658/aliidarabalad

PENDAHULUAN

Pembangunan di tingkat pedesaan menempati posisi yang sangat krusial sebagai fondasi utama kemajuan nasional demi menekan angka disparitas antarwilayah serta mendongkrak kesejahteraan warga secara merata dan berkelanjutan. Dalam mewujudkan tata kelola desa yang mandiri dan berdaya saing tinggi, aspek efektivitas menjadi barometer utama untuk mengukur sejauh mana sebuah program kerja mampu merealisasikan target-target yang telah dicanangkan secara tepat sasaran. Salah satu instrumen vital dalam merajut aspirasi lokal di tingkat akar rumput adalah Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes), sebuah wadah deliberatif tahunan yang bertujuan menciptakan perencanaan yang transparan, partisipatif, serta akuntabel. Secara yuridis, pelaksanaan agenda strategis ini berpijak pada amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta dikuatkan secara teknis melalui Peraturan Bupati Tabalong Nomor 59 Tahun 2022 yang memayungi petunjuk teknis penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes). Penyelarasan regulasi ini sangat penting demi memastikan bahwa alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) benar-benar berorientasi penuh pada kemaslahatan masyarakat luas, bukan sekadar pemenuhan formalitas administratif birokrasi belaka.

Kendati memiliki payung hukum dan petunjuk teknis yang jelas, realitas empiris di Desa Telaga Itar, Kecamatan Kelua, Kabupaten Tabalong menunjukkan bahwa efektivitas pelaksanaan Musrenbangdes masih menghadapi tantangan besar dalam implementasi praktisnya. Berdasarkan hasil pengamatan langsung di lapangan pada tahun 2026, tingkat kepuasan publik terhadap produk musyawarah belum optimal akibat adanya ketimpangan yang lebar antara kuantitas usulan masyarakat dan ketersediaan anggaran desa yang kian menyusut. Fenomena pelik ini diperparah oleh kebijakan pemangkasan alokasi dana desa dari pemerintah daerah pada tahun berjalan, yang berbenturan keras dengan tingginya ekspektasi warga yang mayoritas menginginkan proyek infrastruktur fisik berskala besar. Akibatnya, banyak gagasan dan aspirasi murni warga yang menguap begitu saja tanpa terakomodasi dalam dokumen RKPDes. Pola penetapan prioritas pun dinilai belum menyentuh urusan krusial yang mendesak, lantaran adanya kecenderungan politis untuk memprioritaskan pembangunan fisik eksternal dibandingkan pemberdayaan sektor ekonomi produktif dan sosial, ditambah lagi dengan kompetensi aparatur desa yang belum merata dalam mengedukasi masyarakat terkait penentuan skala prioritas.

Untuk membedah kompleksitas problematika tersebut, literatur ilmiah menyediakan berbagai perspektif teoritis mengenai konsep efektivitas itu sendiri sebagai pisau analisis yang objektif. Menurut Hidayat dkk (2024:8), efektivitas diartikan sebagai tingkat pencapaian tujuan atau hasil akhir yang diinginkan dalam suatu tindakan, kegiatan, atau proses tertentu untuk menentukan sejauh mana target yang ditetapkan dapat tercapai. Sementara itu, jika menilik tata kelola kelembagaan secara struktural, menurut Beni dalam Tadi (2020:27), efektivitas mencerminkan hubungan antara output dan tujuan atau dapat juga dikatakan merupakan ukuran seberapa jauh tingkat output, kebijakan dan prosedur dari organisasi. Sudut pandang makro ini dipertegas oleh Drucker dalam Mutiarin & Zaenudin (2021:114) yang menyatakan bahwa bersikap efektif berarti berkomitmen untuk melakukan sesuatu yang benar, sementara efisiensi berarti melakukan sesuatu dengan benar. Oleh sebab itu, tingkat keberhasilan Musrenbangdes tidak boleh sekadar diukur dari terlaksananya acara secara seremonial, melainkan dari kontribusi nyata keluaran keputusan terhadap pencapaian target strategis jangka panjang desa.

ISSN : 2685-8541
Vol. 8, No. 1, 2026
DOI :10.36658/aliidarabalad

Keberhasilan suatu program dalam mencapai efektivitasnya secara inheren dipengaruhi oleh berbagai elemen internal dan eksternal yang saling berkelindan di dalam ekosistem organisasi publik. Menurut Steers dalam Christo (2019:17-29), terdapat empat faktor utama yang menentukan keberhasilan tersebut, yang meliputi karakteristik organisasi, karakteristik lingkungan sekitar, karakteristik para pekerja, serta pola manajemen yang dirancang sebagai alat kendali strategis pimpinan. Guna mengoperasionalkan variabel kompleks ini dalam sebuah riset ilmiah, menurut Duncan dalam Amrizal dkk (2018:54), efektivitas organisasi dapat dipetakan melalui tiga dimensi indikator utama, yaitu pencapaian tujuan, integrasi organisasi, serta kemampuan adaptasi terhadap dinamika perubahan zaman. Di sisi lain, menurut Campbell dalam Amrizal dkk (2018:41), tolok ukur efektivitas juga harus menyentuh keberhasilan program, keberhasilan sasaran, kepuasan terhadap program, tingkat input dan output, serta pencapaian tujuan menyeluruh. Melalui instrumen terpadu ini, evaluasi Musrenbangdes dapat menyentuh aspek kuantitatif fisik maupun kualitas kepuasan psikologis warga yang terlibat.

Akar tunggang dari pelaksanaan Musrenbangdes adalah konsep musyawarah yang menjadi identitas luhur budaya bangsa sekaligus pilar utama demokrasi deliberatif di Indonesia. Menurut Koentjaraningrat (2009:145), musyawarah diidentifikasi sebagai suatu proses sosial dalam masyarakat yang dilakukan melalui perundingan bersama untuk mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh semua pihak demi menjaga keharmonisan. Konsep deliberasi publik ini sejalan dengan pandangan filosofis dari perspektif hukum dan nilai kemaslahatan, di mana menurut Az-Zuhaili (2009:84), musyawarah dipahami sebagai proses pertukaran pendapat yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk membahas persoalan tertentu demi memperoleh keputusan paling benar yang membawa kebaikan kolektif. Dalam ruang lingkup ilmu tata negara modern, menurut Budiardjo (2008:50), musyawarah merupakan proses pembahasan bersama dalam rangka pengambilan keputusan yang melibatkan partisipasi setiap pihak untuk menyampaikan pendapatnya, sehingga konsensus yang lahir merupakan buah dari pertimbangan rasional bersama, bukan paksaan otoritas sepihak.

Dalam menerjemahkan hasil mufakat menjadi program kerja nyata, diperlukan sebuah sistem perencanaan pembangunan pedesaan yang kokoh, terstruktur, sistematis, dan visioner. Menurut Conyers & Hills dalam buku Perencanaan Pembangunan Wilayah (2010:5), perencanaan diposisikan sebagai suatu proses yang berkesinambungan yang mencakup keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan berbagai alternatif penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu pada masa yang akan datang. Upaya sadar ini bermuara pada pembangunan desa, yang menurut Mardikanto dalam buku Pembangunan Berbasis Masyarakat (2015:6), diartikan sebagai upaya yang dilakukan secara sadar dan terencana serta dilaksanakan terus-menerus oleh pemerintah bersama segenap warga demi menuntaskan masalah dan meningkatkan mutu hidup. Secara administratif pemerintahan, menurut Widjaja (2002:19), komunitas desa memiliki hak otonom untuk mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional, sehingga pembagian linimasa perencanaan wajib disusun secara berjenjang dari jangka panjang hingga rencana tahunan yang operasional.

METODE

Penelitian ini mengambil lokus pada Kantor Desa Telaga Itar, Kecamatan Kelua, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, Jalan Jendral Ahmad Yani kode pos 71552. Pemilihan lokasi didasarkan pada urgensi pengamatan langsung terhadap dinamika perencanaan pembangunan

ISSN : 2685-8541
Vol. 8, No. 1, 2026
DOI :10.36658/aliidarabalad

tingkat desa. Guna membedah fenomena tersebut, peneliti menerapkan pendekatan kualitatif sebagai pijakan metodologis utama demi pendalaman data objektif. Pemilihan orientasi ini selaras dengan pandangan dasar mengenai karakteristik data empiris. Menurut Kaelan dalam Ibrahim (2018:53), pendekatan kualitatif dalam penelitian dicirikan oleh kesadaran penuh bahwa realitas dunia empiris beserta beraneka ragam problematika sosial di dalamnya memiliki sifat nyata, dinamis, serta multidimensional. Karakteristik sosial yang kompleks tersebut tidak mungkin didekati atau diukur secara kaku menggunakan batasan prosedural bersifat eksakta, pasti, ataupun matematis belaka. Oleh karena itu, riset ini didesain secara alamiah untuk menangkap esensi kontekstual langsung di lapangan.

Tipe penelitian yang diadopsi dalam studi ini adalah deskriptif kualitatif yang menitikberatkan pada penggalian makna secara komprehensif. Melalui tipe deskriptif ini, peneliti berupaya memberikan gambaran secara utuh, sistematis, dan mendalam mengenai realitas yang menjadi sasaran pengamatan di lapangan demi mengungkapkan berbagai aspek sasaran riset. Fokus utama yang hendak diungkapkan secara jeli adalah potret mengenai Efektivitas Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) di Desa Telaga Itar, Kecamatan Kelua, Kabupaten Tabalong. Dengan mengandalkan kehadiran peneliti sebagai instrumen kunci, pengumpulan informasi dilakukan secara langsung melalui integrasi tiga pilar metode, yaitu teknik observasi, wawancara mendalam, serta pemanfaatan dokumentasi resmi desa. Melalui kombinasi metode ini, peneliti mampu menyelami secara substansial berbagai fenomena, hambatan, serta dinamika sosial yang melingkupi proses pengambilan keputusan warga. Upaya eksplorasi mendalam tersebut ditujukan untuk mengidentifikasi akar permasalahan sekaligus merumuskan solusi alternatif yang paling relevan dengan kondisi riil di lapangan.

Keberhasilan sebuah analisis kualitatif sangat bergantung pada kualitas dan keabsahan data yang berhasil dihimpun oleh peneliti selama berada di lapangan. Menurut Nasution dalam Naamy Nazar (2019:115-116), data dipahami sebagai sebuah bentuk kebenaran kontemporer atau sementara dalam situasi serta kondisi tertentu yang mewakili bagian dari fakta riil yang menjadi subjek utama pengamatan dalam sebuah riset. Konsep teoretis ini diperkuat oleh perspektif lain yang memandang data sebagai fondasi konseptual. Menurut Sapari Imam Asyari dalam Naamy Nazar (2019:116), data merupakan fakta-fakta, keterangan, atau rujukan informasi yang digunakan sebagai sumber atau bahan untuk menemukan kesimpulan atau membuat keputusan. Di dalam skema operasional riset, klasifikasi data dipisahkan menjadi dua kategori, yakni data primer dan data sekunder. Menurut Ibrahim (2018:68), data primer mencakup segala bentuk informasi, fakta empiris, serta realitas nyata yang bertalian erat dengan fokus riset, di mana tingkat relevansinya terlihat secara langsung, sementara data sekunder diperoleh dari sumber kedua.

Dalam menentukan subjek yang menjadi sumber informasi terpercaya, peneliti menerapkan teknik sampling yang selektif guna menjaga orisinalitas temuan di lapangan. Menurut Kaelan dalam Ibrahim (2018:67), sumber data diidentifikasi sebagai pihak-pihak yang memegang peran sentral selaku narasumber, informan, partisipan, rekan sejawat, maupun mentor di dalam proses pengumpulan data riset. Lebih lanjut, menurut Satori dalam Ibrahim (2018:67), sumber data dapat berwujud benda, manusia, nilai-nilai, atau pihak tertentu yang dinilai mengetahui tentang situasi sosial pada objek material penelitian. Guna merekrut informan yang representatif, riset ini menerapkan teknik pengambilan sampel bertujuan. Menurut Ibrahim (2018:72), purposive sampling digunakan dalam situasi di mana seorang ahli menggunakan penilaiannya dalam memilih responden dengan tujuan tertentu dalam benaknya. Berdasarkan pendekatan tersebut, pada tahun 2026

ISSN : 2685-8541
Vol. 8, No. 1, 2026
DOI :10.36658/aliidarabalad

ditetapkan 12 orang informan kunci, yang terdiri atas Kepala Desa (Muhamad Haris, S.Pd), Sekretaris Desa (Muhammad Ratullah, S.Pd), Kaur Perencanaan (Risa Yulida, S.Pd), anggota BPD (Siti Norhayah), empat Ketua RT (RT 01 sampai RT 04), serta empat perwakilan unsur masyarakat umum.

Agar proses pengukuran dan pengamatan di lapangan dapat berjalan secara terarah dan terhindar dari bias, peneliti menyusun desain operasional yang terstruktur. Menurut Nurdin dan Hartati (2019:122), operasional adalah mendefinisikan variabel secara operasional berdasarkan karakteristik yang diamati yang memungkinkan peneliti melakukan observasi atau pengukuran secara cermat terhadap suatu objek atau fenomena. Rujukan teoretis utama yang digunakan untuk membedah efektivitas dalam studi ini mengacu pada kerangka pemikiran Duncan menurut Richard M. Steers dalam Dedi Amrizal dkk (2018:54), yang membagi efektivitas ke dalam tiga dimensi utama. Dimensi pertama adalah Pencapaian Tujuan, yang diturunkan ke dalam tiga indikator konkret, yakni tingkat kesesuaian hasil musyawarah dengan kebutuhan riil masyarakat, usulan warga yang berhasil terakomodasi, serta tingkat kepuasan publik. Dimensi kedua adalah Adaptasi, yang mencakup partisipasi aktif warga, keterlibatan unsur masyarakat, keterbukaan komunikasi, serta kemampuan penyesuaian lingkungan yang dihadapi. Dimensi ketiga adalah Integrasi, yang diukur melalui kesesuaian program kerja, penentuan prioritas program, keseimbangan pembangunan antarwilayah, serta kapasitas sumber daya manusia aparatur.

Proses pengumpulan data dalam penelitian ini mengkombinasikan berbagai ragam teknik guna memastikan kekayaan informasi yang diperoleh dari informan. Teknik pertama yang diterapkan adalah observasi langsung untuk merekam perilaku sosial secara alami di lokasi studi. Menurut Bungin dalam Ibrahim (2018:81), observasi merupakan aktivitas keseharian manusia yang mengoptimalkan fungsi panca indra mata sebagai instrumen utamanya, dengan didukung oleh indra lainnya. Pandangan ini diperkuat oleh pendapat bahwa melalui observasi, seorang peneliti dapat mempelajari perilaku beserta makna tersirat di balik tindakan tersebut menurut Sugiyono dalam Ibrahim (2018:81). Teknik kedua adalah wawancara mendalam yang dirancang sebagai instrumen dialogis. Menurut Abdussamad Zuchri (2021:143), wawancara merupakan bentuk komunikasi verbal berupa percakapan bertujuan memperoleh informasi atau teknik pengumpulan data dengan tanya jawab antara peneliti dengan objek yang diteliti. Hal ini didukung oleh asumsi bahwa wawancara adalah seni bertanya dan mendengar menurut Denzin & Lincoln dalam Ibrahim (2018:88). Terakhir, dokumen penunjang dihimpun menggunakan teknik dokumentasi, yang menurut Sugiyono dalam Ibrahim (2018:94) dipahami sebagai catatan-catatan peristiwa yang telah lalu.

Fase krusial berikutnya dalam penelitian ini adalah penerapan teknik analisis data kualitatif serta pengujian validitas untuk menjamin mutu temuan. Kerangka kerja analisis dalam riset ini mengadopsi model interaktif. Menurut Hafni Sahir Syafrida (2022:47-48), tahapan analisis data kualitatif meliputi tiga alur utama, yaitu reduksi data untuk menyarikan informasi penting, penyajian data dalam bentuk naratif yang sistematis, serta penarikan kesimpulan atau verifikasi akhir. Guna memastikan seluruh data terbebas dari kesalahan, peneliti menguji kredibilitas informasi yang dikumpulkan di lapangan. Menurut Sugiyono (2019:365-371), pengujian kredibilitas data kualitatif wajib ditempuh melalui lima strategi utama, yang mencakup perpanjangan masa pengamatan di lapangan, peningkatan ketekunan peneliti secara konsisten, penerapan teknik triangulasi data dan sumber, pemanfaatan bahan referensi teoretis sebagai pendukung, serta pelaksanaan member check kepada informan pemberi data.

ISSN : 2685-8541
Vol. 8, No. 1, 2026
DOI :10.36658/aliidarabalad

PEMBAHASAN

A. Efektivitas Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrembangdes) Di Desa Telaga Itar Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong

1. Pencapaian Tujuan

a. Kesesuaian hasil dengan kebutuhan masyarakat

Menilai efektivitas sebuah program pembangunan sebenarnya sederhana: sejauh mana hasilnya mampu menjawab jeritan kebutuhan, harapan, dan problem nyata yang dihadapi masyarakat. Merujuk pada hasil wawancara, pengamatan langsung, dan penelusuran dokumen di Desa Telaga Itar, Kecamatan Kelua, Kabupaten Tabalong, pelaksanaan Musrenbangdes di sana sudah berada pada kategori cukup efektif. Proses perencanaannya tidak berjalan satu arah, melainkan hidup dan partisipatif karena mengalir langsung dari bawah mulai dari rembuk warga di tingkat RT hingga dikawal ke forum desa. Validitas proses ini pun bukan sekadar klaim, melainkan terekam kuat dalam sistem administrasi desa. Lembaran berita acara musyawarah hingga draf APBDes memperlihatkan dengan jelas bahwa program-program yang disepakati memang lahir dari rahim aspirasi masyarakat setempat.

Namun, jika melihat realitas di lapangan, capaian efektivitas ini diakui belum sepenuhnya optimal. Kendala klasik berupa keterbatasan anggaran desa memaksa pemerintah desa untuk menyaring ketat setiap usulan warga dan menetapkan skala prioritas yang kaku. Akibatnya, banyak program penting yang terpaksa ditangguhkan demi mendahulukan kebutuhan yang jauh lebih mendesak, seperti perbaikan fasilitas publik. Fenomena ini sangat sejalan dengan konsep efektivitas organisasi yang dikemukakan oleh Duncan dalam Richard M. Steers (Dedi Amrizal dkk., 2018:54), khususnya pada dimensi Pencapaian Tujuan. Teori tersebut menegaskan bahwa keselarasan antara output kerja dengan pemenuhan hajat hidup publik adalah indikator kunci keberhasilan, sebuah tantangan nyata yang saat ini sedang dihadapi Desa Telaga Itar dalam menjembatani ekspektasi warga dengan keterbatasan ruang fiskal yang ada.

b. Usulan Terakomodasi

Indikator penyerapan aspirasi atau usulan terakomodasi pada dasarnya mengukur sejauh mana suara, harapan, dan kebutuhan riil masyarakat tidak sekadar ditampung, melainkan dipertimbangkan secara serius hingga diwujudkan dalam program pembangunan formal. Berdasarkan triangulasi data yang meliputi wawancara mendalam, pengamatan langsung, dan analisis dokumentasi di Desa Telaga Itar, Kecamatan Kelua, Kabupaten Tabalong, pengelolaan usulan warga melalui forum Musrenbangdes dinilai sudah cukup efektif. Mekanisme bottom-up ini berjalan sangat inklusif dan demokratis, dimulai dari rembuk warga di tingkat RT hingga bermuara di pleno desa. Transparansi proses ini diperkuat oleh bukti administratif yang matang, di mana setiap gagasan dan keluhan warga tercatat secara adil dalam berita acara serta daftar usulan, yang kemudian dipilah secara objektif berdasarkan urgensi di lapangan.

Namun, efektivitas pada fase perencanaan ini harus membentur dinding realitas ketika memasuki tahap eksekusi program. Keterbatasan ruang fiskal (anggaran) serta sekat kewenangan birokrasi yang dimiliki pemerintah desa membuat tidak semua aspirasi dapat langsung diwujudkan secara instan. Alhasil, aparatur desa terpaksa menerapkan penyaringan ketat dengan skala prioritas; usulan yang mendesak akan didahulukan, sementara sisanya terpaksa ditangguhkan ke tahun anggaran berikutnya atau didelegasikan ke Musrenbang tingkat kecamatan. Dinamika empiris ini sangat koheren dengan teori efektivitas organisasi yang digagas oleh Duncan dalam Richard M. Steers (Dedi Amrizal dkk., 2018:54), khususnya pada sub-variabel Pencapaian Tujuan.

ISSN : 2685-8541
Vol. 8, No. 1, 2026
DOI :10.36658/aliidarabalad

Fenomena di Desa Telaga Itar menunjukkan bahwa meski target penjaringan aspirasi secara prosedural telah tercapai dengan sangat baik, tingkat keberhasilan puncaknya dalam mengakomodasi usulan masih dibatasi oleh ketersediaan anggaran daerah.

c. Kepuasan masyarakat

Tingkat kepuasan masyarakat sejatinya merupakan barometer utama untuk mengukur keberhasilan suatu program pembangunan, di mana indikator utamanya terletak pada keselarasan antara hasil nyata dengan ekspektasi warga. Berdasarkan triangulasi data melalui wawancara mendalam, pengamatan lapangan, serta analisis dokumen di Desa Telaga Itar, Kecamatan Kelua, Kabupaten Tabalong, pelaksanaan Musrenbangdes dinilai sudah cukup efektif, meskipun respons yang muncul di permukaan sangat dinamis dan variatif. Sebagian warga mengekspresikan kepuasan yang tinggi karena aspirasi mereka berhasil diwujudkan menjadi program konkret yang bermanfaat. Di sisi lain, riak ketidakpuasan tetap tidak bisa dihindari dari kelompok masyarakat yang usulannya belum terealisasi. Fenomena ini dipicu oleh keterbatasan ruang fiskal desa dan belum meratanya pembangunan, meskipun tingkat penerimaan warga menjadi lebih baik ketika mereka memahami kondisi keuangan desa yang sebenarnya.

Realitas sosial tersebut tergambar jelas dalam dokumen administratif desa, mulai dari berita acara musyawarah, daftar usulan, hingga laporan kegiatan, yang memperlihatkan tingginya partisipasi publik sekaligus ketatnya proses seleksi berbasis skala prioritas. Dinamika kepuasan yang beragam ini sangat koheren dengan teori efektivitas organisasi yang dikemukakan oleh Duncan dalam Richard M. Steers (Dedi Amrizal dkk., 2018:54). Dari tiga dimensi yang diuraikan, aspek kepuasan masyarakat di Desa Telaga Itar berkaitan erat dengan sub-variabel Pencapaian Tujuan. Hal ini menegaskan bahwa efektivitas suatu agenda publik tidak sekadar diukur dari tertibnya tahapan birokrasi, melainkan dari seberapa optimal tujuan tersebut mampu memitigasi permasalahan warga di tengah keterbatasan anggaran yang dimiliki pemerintah desa.

2. Adaptasi

a. Partisipasi masyarakat

Keterlibatan aktif warga merupakan pilar utama dalam mengawal keberhasilan setiap agenda pembangunan agar program yang dieksekusi benar-benar tepat sasaran dan berdampak maksimal. Berdasarkan triangulasi data yang memadukan wawancara mendalam, pengamatan langsung di lapangan, serta penelusuran dokumen administratif di Desa Telaga Itar, Kecamatan Kelua, Kabupaten Tabalong, tingkat partisipasi masyarakat dalam forum Musrenbangdes terbukti telah berjalan dengan sangat efektif. Antusiasme publik tidak sekadar tercermin dari angka kehadiran dalam absensi, melainkan dari keaktifan warga, perangkat desa, dan tokoh masyarakat dalam menyuarakan gagasan serta mengawal usulan, baik yang disampaikan langsung secara lisan maupun yang dititipkan melalui rembuk berjenjang sejak tingkat RT. Aparatur desa juga dinilai berhasil menciptakan ruang publik yang inklusif dengan memberikan hak serta kesempatan yang setara bagi seluruh elemen masyarakat tanpa diskriminasi.

Contoh nyata partisipasi yang dinamis ini sangat selaras dengan teori efektivitas organisasi oleh Duncan dalam Richard M. Steers (Dedi Amrizal dkk., 2018:54). Dari tiga dimensi utama yang memengaruhi efektivitas, fenomena tingginya keterlibatan warga di Desa Telaga Itar merepresentasikan sub-variabel Adaptasi. Dalam konteks ini, kemampuan masyarakat dan pemerintah desa untuk saling menyesuaikan diri, merespons dinamika kebutuhan lokal, serta membuka ruang dialog yang akomodatif menunjukkan bahwa sistem perencanaan di desa tersebut sangat tanggap terhadap perubahan dan kebutuhan riil di lapangan. Melalui penguatan fungsi adaptasi yang berbasis pada partisipasi optimal ini, program-program pembangunan yang disepakati

ISSN : 2685-8541
Vol. 8, No. 1, 2026
DOI :10.36658/aliidarabalad

tidak hanya memiliki legitimasi sosial yang kuat, tetapi juga memiliki peluang keberhasilan yang jauh lebih tinggi dalam menjawab tantangan di tingkat tapak.

b. Keterlibatan unsur masyarakat

Keterlibatan berbagai komponen masyarakat—mulai dari aparatur desa, tokoh agama, perwakilan perempuan, pengurus RT, hingga warga umum—merupakan pilar utama dalam melahirkan kebijakan pembangunan yang berpihak pada kepentingan bersama. Hasil perpaduan data melalui wawancara, pengamatan langsung, serta penelusuran dokumen di Desa Telaga Itar, Kecamatan Kelua, Kabupaten Tabalong, membuktikan bahwa mobilisasi elemen warga dalam forum Musrenbangdes sudah berjalan cukup efektif. Secara prosedural, pemerintah desa telah berhasil merangkul beraneka lapisan sosial untuk hadir, bertukar pikiran, dan menyalurkan gagasan mereka dalam iklim musyawarah yang terbuka.

Walau demikian, realitas di ruang rapat menunjukkan bahwa interaksi yang terbangun belum sepenuhnya berimbang. Proses diskusi dan pengambilan keputusan masih cenderung didominasi oleh jajaran perangkat desa serta tokoh-tokoh senior, sementara peran aktif dari generasi muda dirasa masih minim dan perlu dipacu agar lebih bergairah. Fenomena ketimpangan partisipasi ini sangat berkaitan dengan sub-variabel Adaptasi pada teori efektivitas organisasi yang diuraikan oleh Duncan dalam Richard M. Steers (Dedi Amrizal dkk., 2018:54). Catatan kritis ini menegaskan bahwa untuk mencapai tingkat keberhasilan yang optimal, mekanisme Musrenbangdes di Desa Telaga Itar harus lebih adaptif dalam merancang strategi komunikasi yang mampu memantik keaktifan seluruh kelompok masyarakat secara seimbang.

c. Keterbukaan komunikasi

Transparansi dalam berkomunikasi menjadi fondasi krusial untuk membangun rasa saling percaya antara pemerintah desa dan warga, di mana semua pihak memiliki ruang aman untuk bertukar informasi tanpa sekat pembatas. Di Desa Telaga Itar, Kecamatan Kelua, Kabupaten Tabalong, iklim keterbukaan ini terbukti telah berjalan dengan sangat efektif selama proses Musrenbangdes. Kebijakan ini bukan sekadar formalitas di atas kertas; seluruh data mengenai program kerja, rincian anggaran, hingga keputusan akhir disebarluaskan secara gamblang. Aparatur desa memanfaatkan kombinasi saluran digital dan fisik, mulai dari pemasangan baliho besar, spanduk, dan papan pengumuman di titik-titik strategis, hingga sosialisasi tatap muka oleh perangkat desa, pengurus RT, dan BPD. Akses publik yang terbuka lebar terhadap dokumen RKP Desa serta APBDes ini membuat masyarakat dapat memantau jalannya pembangunan secara langsung, meskipun distribusi informasi ini tetap perlu diperluas agar menjangkau pelosok desa secara lebih merata.

Kelancaran arus informasi yang dua arah ini menunjukkan keselarasan yang kuat dengan teori efektivitas organisasi yang digagas oleh Duncan dalam Richard M. Steers (Dedi Amrizal dkk., 2018:54), khususnya melalui sub-variabel Adaptasi. Dalam konteks ini, keterbukaan komunikasi berfungsi sebagai instrumen strategis bagi birokrasi desa untuk menyesuaikan diri dengan dinamika sosial dan tuntutan transparansi zaman. Ketika batasan informasi berhasil dipangkas, pemerintah desa tidak hanya meminimalkan potensi salah paham atau kecurigaan publik, melainkan juga memperkuat kapasitas adaptasi kelembagaan dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang responsif dan akuntabel. Melalui komunikasi yang sehat, Desa Telaga Itar berhasil menciptakan ekosistem pembangunan yang inklusif, di mana warga tidak lagi menempatkan diri sebagai penonton, melainkan sebagai mitra aktif pemerintah.

d. Kemampuan Dalam Menyesuaikan Kondisi Lingkungan Yang Dihadapi

Keluwesan dalam merespons dinamika lingkungan sekitar menjadi kunci utama bagi sebuah program pembangunan agar tetap relevan dan berdaya guna di tengah perubahan situasi serta kebutuhan warga. Berdasarkan hasil penelusuran melalui

ISSN : 2685-8541
Vol. 8, No. 1, 2026
DOI :10.36658/aliidarabalad

wawancara mendalam dan pengamatan langsung di Desa Telaga Itar, Kecamatan Kelua, Kabupaten Tabalong, kemampuan menyelaraskan perencanaan dengan kondisi riil daerah melalui forum Musrenbangdes dinilai sudah cukup efektif. Pemerintah desa tampak jeli melihat peluang dengan merancang agenda kerja yang berpijak pada karakteristik lokal, seperti penguatan sektor pertanian, budidaya perikanan, pemberdayaan UMKM, perbaikan jaringan irigasi, penyediaan jalan usaha tani, hingga pengembangan BUMDes. Langkah taktis ini menunjukkan adanya kesadaran kolektif untuk mengaitkan arah kebijakan dengan potensi ekonomi yang nyata-nyata ada di sekeliling mereka.

Meskipun demikian, kapasitas penyesuaian ini dirasa belum sepenuhnya optimal dan masih menyisakan ruang pembenahan yang cukup besar. Di lapangan, peneliti masih menemukan adanya beberapa program yang meleset dari target, yang sebagian besar dipicu oleh belum dikelolanya potensi dan kapasitas sumber daya manusia secara maksimal. Fenomena fluktuasi ini sangat gayut dengan teori efektivitas organisasi oleh Duncan dalam Richard M. Steers (Dedi Amrizal dkk., 2018:54), khususnya pada dimensi Adaptasi. Catatan kritis dari Desa Telaga Itar ini menegaskan bahwa penyelarasan lingkungan tidak boleh melulu berfokus pada pembangunan fisik dan ekonomi semata, melainkan bagaimana instrumen Musrenbangdes mampu bergerak lebih fleksibel dalam merangkul serta mengasah bakat internal warganya demi mencapai target pembangunan yang paripurna.

3. Integrasi

a. Kesesuaian program

Keselarasan sebuah agenda pembangunan dengan realitas di lapangan menjadi tolok ukur krusial untuk menilai apakah program tersebut benar-benar membawa manfaat nyata atau sekadar formalitas belaka. Berdasarkan hasil sintesis data dari wawancara mendalam dan pengamatan langsung di Desa Telaga Itar, Kecamatan Kelua, Kabupaten Tabalong, tingkat kesesuaian program yang dilahirkan melalui forum Musrenbangdes dinilai sudah berada pada kategori cukup efektif. Walaupun porsi pembangunan infrastruktur fisik saat ini masih mendominasi postur anggaran, pemerintah desa secara bertahap mulai mengalihkan perhatian kebijakan ke arah program pemberdayaan ekonomi warga serta peningkatan mutu sumber daya manusia (SDM). Langkah penyesuaian ini terus diupayakan secara konsisten oleh aparatur desa, meskipun keterbatasan ruang fiskal sering kali menjadi batu sandungan yang membuat penyelesaian masalah krusial di desa belum bisa tuntas secara instan.

Dinamika pergeseran orientasi program di tengah keterbatasan dana ini sangat koheren dengan teori efektivitas organisasi yang digagas oleh Duncan dalam Richard M. Steers (Dedi Amrizal dkk., 2018:54), khususnya pada dimensi Integrasi. Konsep integrasi dalam konteks ini menggarisbawahi pentingnya harmonisasi serta keterpaduan antara perencanaan strategis, ketersediaan anggaran, dan kebutuhan riil masyarakat agar tidak berjalan sendiri-sendiri. Upaya keras Pemerintah Desa Telaga Itar dalam menyeimbangkan proyek fisik dengan penguatan kapasitas kapasitas warga mencerminkan proses penyatuan elemen-elemen tersebut. Melalui penguatan fungsi integrasi yang lebih matang, kebijakan pembangunan yang dirumuskan tidak hanya akan berjalan sesuai dengan draf perencanaan, melainkan mampu menciptakan dampak yang terpadu demi kesejahteraan jangka panjang masyarakat setempat.

b. Penentuan program

Merumuskan agenda pembangunan yang tepat sasaran sejatinya menjadi fondasi utama agar roda pemerintahan desa berjalan terarah dan membuahkan hasil nyata bagi masyarakat. Melalui penggabungan data wawancara, pantauan langsung di lapangan, serta bukti administratif di Desa Telaga Itar, Kecamatan Kelua, Kabupaten Tabalong, proses penentuan program lewat forum Musrenbangdes dinilai sudah cukup efektif.

ISSN : 2685-8541
Vol. 8, No. 1, 2026
DOI :10.36658/aliidarabalad

Keberhasilan ini ditandai dengan adanya jalinan kerja sama yang sinergis antara perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), jajaran ketua RT, hingga warga dalam menyusun draf kegiatan berdasarkan urutan urgensi kebutuhan. Keterlibatan kolektif tersebut bukan sekadar formalitas, melainkan terekam valid dalam berkas otentik seperti daftar usulan warga, absensi peserta, berita acara rapat, hingga catatan notulen yang tertata rapi.

Kendati demikian, tahapan krusial ini masih menyisakan beberapa catatan penting agar ke depannya bisa berjalan lebih optimal dan inklusif. Peneliti mengamati masih adanya riak intervensi atau dominasi dari pihak-pihak tertentu saat menetapkan skala prioritas, ditambah lagi dengan tingkat pemahaman sebagian warga mengenai mekanisme penyaringan usulan yang belum sepenuhnya merata. Realitas di lapangan ini sangat berkelindan dengan teori efektivitas organisasi oleh Duncan dalam Richard M. Steers (Dedi Amrizal dkk., 2018:54), khususnya pada sub-variabel Integrasi. Konsep ini menegaskan pentingnya penyatuan persepsi, keselarasan komunikasi, dan konsensus bersama antar-elemen. Oleh karena itu, penguatan sosialisasi serta transparansi mutlak diperlukan agar proses penentuan kebijakan di Desa Telaga Itar terbebas dari dominasi kelompok tertentu dan berjalan lebih demokratis.

c. Keseimbangan pembangunan

Pemerataan kemajuan di tingkat tapak bukan berarti memaksakan semua proyek berjalan serentak, melainkan bagaimana mengalokasikan sumber daya secara adil, proporsional, dan berkesinambungan demi kemaslahatan jangka panjang. Menilik hasil wawancara mendalam serta pengamatan langsung di Desa Telaga Itar, Kecamatan Kelua, Kabupaten Tabalong, upaya menciptakan keselarasan sektor ini melalui forum Musrenbangdes dinilai sudah berada pada kategori cukup efektif. Aparatur desa menyiasati keterbatasan yang ada dengan menetapkan skema pembangunan berkala dan bergiliran di seluruh lingkungan RT. Langkah mendahulukan wilayah tertentu bukan bentuk ketidakadilan, melainkan sebuah keputusan taktis yang didasarkan pada tingkat kedaruratan dan urgensi fasilitas di lapangan, sehingga cita-cita pemerataan tetap dapat diwujudkan tanpa ada wilayah yang dianaktirikan.

Pola distribusi kebijakan yang selektif namun tetap berorientasi pada asas keadilan ini sangat koheren dengan teori efektivitas organisasi oleh Duncan dalam Richard M. Steers (Dedi Amrizal dkk., 2018:54), khususnya pada dimensi Integrasi. Dalam sistem tata kelola pemerintahan desa, sub-variabel integrasi ini menggarisbawahi krusialnya menyatukan berbagai kepentingan spasial (antar-RT) dan sektoral agar tidak melahirkan ketimpangan sosial yang mencolok. Keberhasilan Desa Telaga Itar dalam memadukan keterbatasan ruang fiskal dengan tuntutan keadilan wilayah membuktikan bahwa fungsi koordinasi dan penyelarasan dalam Musrenbangdes telah berjalan dengan matang, sehingga roda pembangunan desa tetap bergerak seimbang dan meminimalkan potensi kecemburuan sosial di tengah masyarakat.

d. Sumber Daya Manusia

Kualitas sumber daya manusia (SDM) merupakan motor penggerak utama dalam sebuah organisasi, di mana kecakapan, kedisiplinan, dan rasa tanggung jawab para anggotanya sangat menentukan keberhasilan suatu agenda. Merujuk pada hasil wawancara dan pengamatan langsung di Desa Telaga Itar, Kecamatan Kelua, Kabupaten Tabalong, kompetensi para pelaksana dalam mengawal forum Musrenbangdes dinilai sudah cukup efektif. Aparatur desa memperlihatkan kemampuan yang andal dalam merumuskan draf perencanaan pembangunan, ditambah lagi dengan adanya asistensi yang solid dari pendamping desa serta dukungan partisipatif yang kuat dari warga sekitar.

Kendati demikian, potret di lapangan menunjukkan bahwa performa ini belum sepenuhnya berjalan mulus akibat terganjal beberapa kendala, seperti sebaran keahlian

ISSN : 2685-8541
Vol. 8, No. 1, 2026
DOI :10.36658/aliidarabalad

perangkat desa yang belum merata, keterbatasan jumlah personel, komunikasi internal yang belum padu, hingga minimnya sokongan anggaran. Kesenjangan ini sangat berkelindan dengan konsep efektivitas organisasi yang digagas oleh Duncan dalam Richard M. Steers (Dedi Amrizal dkk., 2018:54), khususnya pada dimensi Integrasi. Teori ini menekankan pentingnya penyatuan potensi individu dan harmonisasi kerja sama; artinya, demi mencapai Musrenbangdes yang ideal, Desa Telaga Itar perlu fokus pada penguatan kapasitas staf dan pembenahan pola koordinasi agar kolaborasi yang terbangun bisa lebih utuh dan tidak timpang.

B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) Di Desa Telaga Itar Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong

1. Faktor Penghambat

a. Banyaknya Usulan Masyarakat Yang Belum Dapat Direalisasikan Karena Keterbatasan Anggaran Desa

Proses penjaringan ide yang dilakukan secara berjenjang dari RT 1 hingga RT 4 di Desa Telaga Itar sebenarnya telah berjalan dengan sangat akomodatif, transparan, dan terdokumentasi rapi dalam berita acara musyawarah. Kendati demikian, benturan realitas terjadi pada fase eksekusi, di mana ruang fiskal anggaran desa sangat terbatas untuk mendanai seluruh usulan tersebut. Berdasarkan keterangan perangkat desa, persentase program yang dapat diakomodasi hanya berkisar antara 20% hingga 40% saja, yang sebagian besar masih didominasi oleh pembangunan infrastruktur fisik. Kondisi ini memaksa pemerintah desa bersama BPD untuk menerapkan sistem penyaringan yang ketat, sehingga usulan-usulan yang dianggap kurang mendesak terpaksa ditangguhkan ke tahun anggaran berikutnya atau didelegasikan ke forum musyawarah tingkat kecamatan.

b. Masih Ada Sebagian Masyarakat Yang Menganggap Seluruh Usulan Harus Langsung Direalisasikan Karena Kurangnya Pemahaman Terhadap Mekanisme Penentuan Prioritas Program Pembangunan

Riak-riak ketidakpuasan yang muncul di tengah masyarakat umumnya berakar dari adanya ekspektasi bahwa semua usulan yang telah disampaikan harus segera diwujudkan pada tahun anggaran berjalan. Fenomena ini diperkuat oleh temuan lapangan yang menunjukkan tingkat kepuasan publik berada di angka 60% sampai 80%, di mana sebagian warga merasa pembangunan di desanya belum merata jika aspirasi kelompok mereka tertunda. Ketidakpuasan ini sejatinya dipicu oleh kurangnya pemahaman mendalam dari sebagian masyarakat mengenai rumitnya tata cara penentuan skala prioritas dan keterbatasan dana operasional desa. Edukasi serta pendekatan komunikasi yang lebih humanis mengenai tata kelola anggaran sangat dibutuhkan agar warga dapat menyikapi hasil keputusan Musrenbangdes secara lebih realistis dan bijak.

c. Kurangnya Ketepatan Penentuan Skala Prioritas Program Karena Perbedaan Kepentingan Antar Masyarakat

Arah kebijakan pembangunan yang dihasilkan dalam Musrenbangdes dinilai sudah cukup selaras dengan garis besar rencana induk desa, namun fokus kegiatannya dinilai masih terlalu timpang karena sangat condong pada sektor pembangunan fisik. Walaupun beberapa tahun terakhir pemerintah desa mulai merintis program non-fisik seperti pemberdayaan ekonomi, penguatan UMKM, irigasi, dan pelatihan kerja guna mendongkrak kualitas SDM, intervensi tersebut belum berjalan secara masif. Hambatan utamanya terletak pada sulitnya menyatukan berbagai benturan kepentingan antar-kelompok masyarakat di tengah keterbatasan dana daerah. Oleh karena itu, aparatur desa dituntut untuk terus mengevaluasi formulasi prioritas ini agar ke depannya terjadi keseimbangan yang utuh antara pembangunan fasilitas umum dengan program peningkatan kapasitas ekonomi warga.

ISSN : 2685-8541
Vol. 8, No. 1, 2026
DOI :10.36658/aliidarabalad

2. **Faktor Pendukung**
   a. **Cukup Tingginya Keterlibatan Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes)**

      Rangkaian temuan di lapangan baik melalui diskusi mendalam, pantauan langsung, maupun bukti otentik daftar hadir menunjukkan bahwa proses penjaringan aspirasi di Desa Telaga Itar berjalan sangat dinamis dan inklusif. Pendekatan berjenjang yang dimulai dari rembuk informal di tingkat RT terbukti sangat efektif memancing keberanian warga untuk bersuara, dengan tingkat kehadiran yang representatif dari berbagai elemen seperti tokoh masyarakat, keterwakilan perempuan, hingga jajaran pengurus lingkungan. Pemerintah desa juga secara konsisten mengedukasi warga agar usulan yang diajukan benar-benar berbasis pada skala prioritas dan penyelesaian masalah riil, bukan sekadar pemenuhan keinginan sesaat. Bukti dokumentasi forum memperlihatkan interaksi dua arah yang hidup, menegaskan bahwa hak berpendapat dibuka lebar bagi siapa saja, sehingga perencanaan pembangunan di desa ini memiliki legitimasi sosial yang kuat dari akar rumput.

   b. **Komunikasi Dan Informasi Yang Terbuka Antara Pemerintah Desa Dan Masyarakat**

      Sistem penyebaran informasi dan pola komunikasi antara aparatur Desa Telaga Itar dengan masyarakatnya telah menerapkan prinsip keterbukaan yang nyata. Berdasarkan verifikasi data yang diperkuat oleh keberadaan spanduk APBDes serta dokumen RKP Desa di area publik, pemerintah desa secara gamblang membuka rincian program kerja beserta alokasi anggarannya. Informasi tersebut dikemas secara sederhana dan dipajang di titik strategis, seperti di depan kantor desa, agar mudah diakses dan dipantau oleh warga kapan saja, bahkan kini didukung oleh integrasi sistem pelaporan digital dari tingkat kabupaten (SPPD). Keterbukaan multi-kanal ini berhasil memangkas jarak pembatas antara pengambil kebijakan dan penerima manfaat, menciptakan iklim transparansi yang sehat, serta memberikan ruang bagi masyarakat untuk ikut mengawal setiap rupiah anggaran desa secara mandiri.

SIMPULAN

Secara keseluruhan, kajian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) di Desa Telaga Itar, Kecamatan Kelua, Kabupaten Tabalong, berada pada kategori cukup efektif, yang didorong kuat oleh tingginya antusiasme warga untuk urun rembuk sejak tingkat RT serta transparansi total pemerintah desa dalam menyebarluaskan rincian anggaran dan program kerja melalui baliho maupun papan pengumuman. Keberhasilan ini didukung oleh kecakapan aparatur desa yang bersinergi dengan berbagai elemen masyarakat dalam melahirkan perencanaan yang adaptif, termasuk upaya menggeser orientasi kebijakan yang semula didominasi proyek infrastruktur fisik ke arah pemberdayaan ekonomi dan peningkatan mutu sumber daya manusia. Namun, capaian tersebut belum sepenuhnya optimal karena harus membentur kendala klasik berupa keterbatasan anggaran dan sekat kewenangan desa, yang mengakibatkan tidak semua aspirasi warga bisa langsung diwujudkan pada tahun berjalan. Hambatan tersebut kian diperparah oleh adanya intervensi pihak tertentu dalam menentukan prioritas pembangunan, belum meratanya fasilitas di sejumlah wilayah, pasifnya keterlibatan generasi muda, serta minimnya pemahaman sebagian masyarakat mengenai sistem penyaringan usulan berbasis skala prioritas, sehingga memicu riak ketidakpuasan dan kesalahpahaman terkait realisasi agenda tahunan desa.

DAFTAR PUSTAKA

Anonim, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 *Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.*

ISSN : 2685-8541
Vol. 8, No. 1, 2026
DOI :10.36658/aliidarabalad

Anonim, Peraturan Bupati Tabalong Nomor 59 Tahun 2022 *Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka MenengahDesa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes).*

Amrizal, Dedi., dkk. (2018). *Penanggulangan Golput Dalam Pelaksanaan Pemilu Legislative dan Pilkada*. Medan: Lembaga penelitian dan penulisan ilmiah AQLI.

Aryadi, Tadi. (2020). *Analisis Efektifitas Kerja Pegawai. Cirebon: CV. Elsi Pro. Az-Zuhaili, Wahbah (2009)*. Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu. Damaskus: Dar Al-Fikr.

Ibrahim M.A. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV Alfabeta.

Mutiarin, Dyah dan Zainudin, Arif. (2020). *Manajemen Birokrasi dan Kebijakan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Naamy, Nazar. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Nusa Tenggara Barat: Pusat Penelitian dan Publikasi Ilmiah.

Nasution, A. F. (2023). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cv Harfa Creative.